



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
KANTOR KECAMATAN BATUI**

**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKJIP)
2019**



Tahun 2020

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang atas karunia dan kekuasaanya kami dapat menyajikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2018. Laporan ini merupakan kewajiban Pemerintah Kecamatan Batui sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Banggai.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan suatu gambaran pelaksanaan tugas yang telah dilaksanakan perangkat kantor Kecamatan Batui selama tahun 2018, laporan ini juga berfungsi sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja oleh Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kecamatan Batui sebagai bahan perbaikan untuk kinerja yang lebih baik lagi.

Kami mengakui bahwa Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2018 ini masih jauh dari sempurna sehingga saran yang membangun sangat kami perlukan. Semoga laporan ini dapat bermanfaat dan menjadi bahan yang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalmu'alaikum Wr. Wb.

Batui, 10 Januari 2020

CAMAT BATUI


HARIANTO K. GALIB, S.Sos

NIP. 19680214 199303 1 015

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kecamatan Batui tahun 2019 ini merupakan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan sebagaimana Peraturan Bupati Nomor 81 tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi.

LKJIP ini juga merupakan capaian kinerja (*Performnace Result*) yang sesuai dengan rencana kerja (*Performance Planning*) Kecamatan Batui Tahun 2019.

Berdasarkan penilaian sendiri (*Self assessment*) atas realisasi pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2019, menunjukkan bahwa rata-rata nilai capaian kinerja dari 1 Program wajib yang dilaksanakan oleh Kecamatan adalah 102,35% sehingga dapat dikategorikan sangat baik. Sedangkan untuk capaian realisasi anggaran sebesar Rp. 3.080.175.909,00 dari jumlah anggaran yang ditetapkan yaitu sebesar Rp. 4.445.326.000,00 itu artinya penyerapan anggaran sebesar 81,16% atau efisiensi sebesar 18,84%.

Agar dapat mengoptimalkan kinerja dalam rangka mencapai sasaran yang ditetapkan dalam renstra PD diperlukan beberapa langkah yang dapat mendongkrak kinerja PD agar maksimal untuk itu Kecamatan Batui telah melakukan beberapa hal agar sasaran dan tujuan dapat tercapai yaitu :

1. Melaksanakan koordinasi rutin dengan MUSPIKA, PD yang ada di Kecamatan yang dimaksudkan agar pelaksanaan pemerintahan di Wilayah Kecamatan Batui dapat berjalan tertib dan kondusif;
2. Melaksanakan monitoring Program-program yang dilaksanakan di Desa secara rutin;
3. Melaksanakan koordinasi rutin dengan sekmat, kasi, kasubag dan staf untuk mensukseskan program dan kegiatan yang dilaksanakan;
4. Melaksanakan evaluasi rutin terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh PD Kecamatan.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan tidak terlepas dari peran dan fungsi ASN itu sendiri sehingga kualitas dan kompetensi ASN perlu ditingkatkan terus agar terciptanya ASN yang profesionalisme dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik di tingkat Kecamatan Batui.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Struktur Organisasi.....	2
1.2 Fungsi dan Tugas	3
1.3 Isu-Isu Strategis.....	4
1.4 Keadaan Pegawai	7
1.5 Keadaan Sarana dan Prasarana.....	18
1.6 Keuangan.....	19
1.7 Sistematika LKj IP.....	20
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	22
2.1 Perencanaan Strategis.....	22
2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah.....	23
2.1.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.....	26
2.1.3 Strategi dan arah Kebijakan.....	26
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2019	28
2.3 Rencana Anggaran Tahun 2019.....	28
2.3.1 Target Belanja Kecamatan Batui.....	29
2.3.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis.....	29
2.4 Instrumen Pendukung.....	30
2.5 Inovasi	
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	33
3.1. Capaian Kinerja Tahun 2019.....	33
3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis.....	34
3.3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Lainnya.....	40
3.4. Akuntabilitas Anggaran.....	44

BAB V PENUTUP.....45

LAMPIRAN- LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

Salah satu kewajiban Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah adalah memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah dan memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat. Sebagaimana juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat.

Selaku salah satu perangkat daerah yang mempunyai wilayah kerja lingkup Kecamatan yang memperoleh pelimpahan sebagian kewenangan Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, disamping menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, maka Kantor Kecamatan Batui berkewajiban pula untuk menyusun dan menyampaikan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi sesuai kewenangan yang ada kepada Bupati yang dituangkan dalam "Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kantor Kecamatan Batui Tahun Anggaran 2018". Sekaligus sebagai bahan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati kepada DPRD.

Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 112);
- e. Peraturan Bupati Banggai Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai.

Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Penyusunan LKjIP Kantor Kecamatan Batui Tahun 2018 dimaksudkan sebagai penjabaran rencana strategis sehingga dapat dipergunakan sebagai pedoman untuk melaksanakan kegiatan pembangunan dan pengembangan bidang Adminitrasi Pemerintahan, sesuai dengan bidang tugas dan fungsi serta tanggungjawab masing-masing.

b. Tujuan

Penyusunan LKjIP Kantor Kecamatan Batui Tahun 2018 bertujuan agar penyelenggaraan program/kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan, akuntabel dan terukur selama tahun anggaran 2018 guna perbaikan kinerja di tahun berikutnya.

A. Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN BATUI

Struktur Organisasi Kecamatan Batui terdiri dari :

Camat	: HARIANTO K. GALIB, S.Sos
Sekretaris Camat	: MUSLIH B. ADING, S.Pd
Kasi Pemerintahan	: ZURaida B. SALAM, S.Sos
Kasi Ketentraman & Ketertiban Umum	: ARDAN, S.Pd
Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kelurahan	: SUARNI SOTANI

Kasi Pembangunan

:Drs. MAKMUR

Kasi Pelayanan Informasi dan Pengaduan

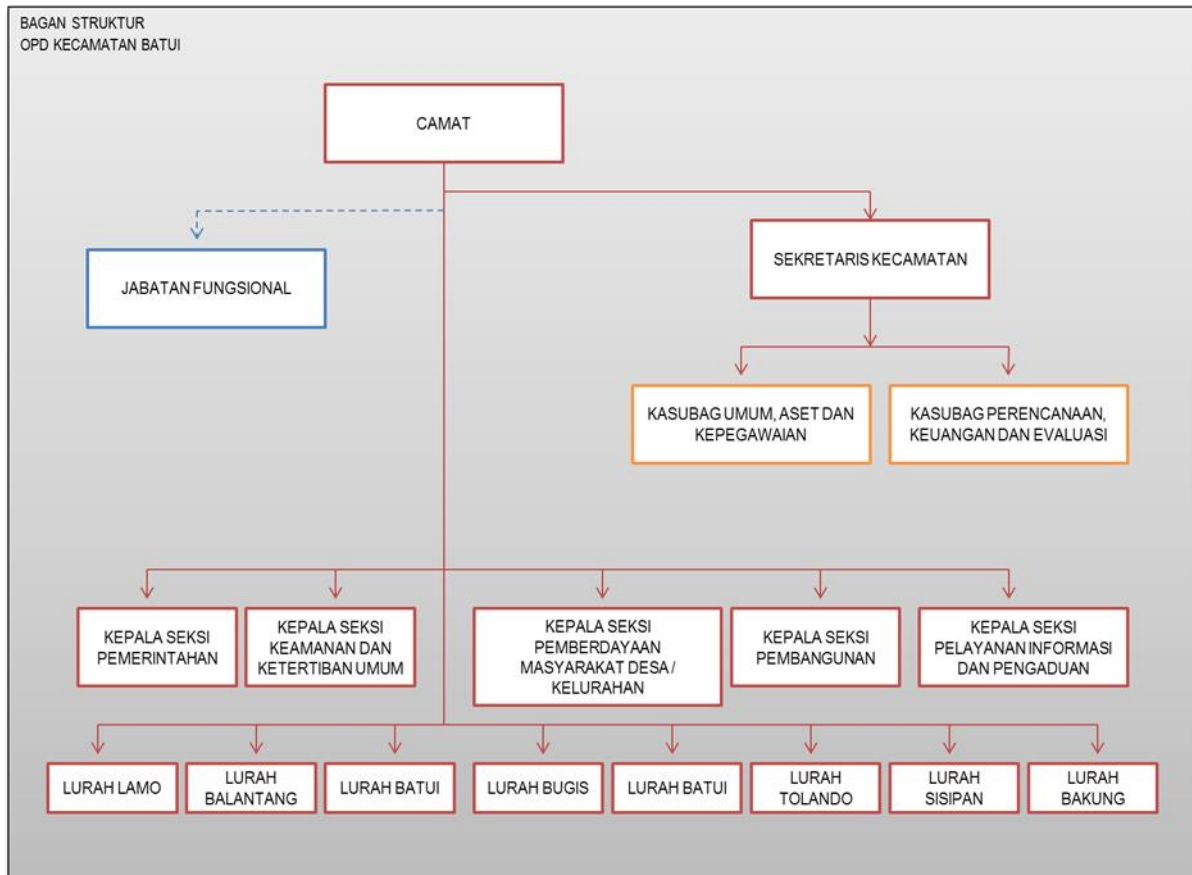
: Hj. BAHRIA DG. MANGATA, S.Pd

Kasubag Umum, Aset &Kepegawaian

: WIRDA K. LASANG, S.Kom

Kasubag Perencanaan Keuangan & Evaluasi: MARIYANI LAMADA, SH

BAGAN ORGANISASI KECAMATAN BATUI



B. Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kecamatan Batui

Sesuai dengan PP No. 41 tahun 2007 tentang struktur organisasi Perangkat daerah yang dijabarkan dalam Peraturan Daerah, Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomidaerah.

2. Pelaksanaan Koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat.
3. Pelaksanaan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
4. Pelaksanaan koordinasi penerapan penegakan peraturan perundang-undangan
5. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
6. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintah di tingkat kecamatan
7. Pembinaan penyelenggaraan pemerintah Desa/Kelurahan;
8. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya;
9. Pembinaan dan pelaksanaan kesekretariatan kecamatan;
10. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

A. TUGAS DAN FUNGSI

Dalam menjalankan fungsinya Camat beserta perangkatnya (Sekretariat dan Seksi-seksi) mempunyai tugas sebagai berikut:

Pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 126 dijelaskan bahwa Kecamatan dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian kewenangan Bupati atau Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi. Camat dalam melaksanakan tugas-tugasnya dibantu oleh Perangkat Kecamatan dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai.

1. CAMAT

Camat Mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan tugas umum pemerintahan dan menangani sebagian urusan otonomi daerah meliputi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pengkoordinasian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

kabupaten, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan / atau kelurahan, pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten yang ada di kecamatan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

2. SEKRETARIAT KECAMATAN

Sekretaris kecamatan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan operasional kecamatan di bidang kesekretariatan yang meliputi penyiapan penyelenggaraan urusan administrasi, koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi, pengelolaan aset dan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas umum, aset, kepegawaian, perencanaan, keuangan dan evaluasi.

Untuk menjalankan fungsinya Sekretariat Kecamatan dibantu oleh dua Sub Bagian terdiri dari :

Kepala Sub Bagian Umum, Aset & Kepegawaian yang mempunyai tugas :

Memimpin dan melaksanakan kegiatan umum, asset dan kepegawaian meliputi penyiapan bahan penyelenggaraan urusan, penyiapan bahan pengkoordinasian urusan, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan umum, asset dan kepegawaian.

Kepala Sub Bagian Prencanaan Keuangan & Evaluasi yang mempunyai tugas yaitu :.

Memimpin dan Melaksanakan kegiatan perencanaan, Keuangan dan evaluasi meliputi penyiapan bahan penyelenggaraan urusan, penyiapan bahan pengkoordinasian urusan, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan perencanaan, keuangan dan evaluasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Seksi Pemerintahan

Kepalaseksi Pemerintahan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan kegiatan pemerintahan meliputi, penyiapan bahan penyelenggaraan urusan, penyiapan bahan pengkoordinasian urusan, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban.

Memimpin dan melaksanakan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum meliputi penyiapan bahan penyelenggaraan urusan, penyiapan bahan pengkoordinasian urusan, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku

5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa / Kelurahan.

Memimpin dan melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa / kelurahan meliputi penyiapan bahan penyelenggaraan urusan, penyiapan bahan pengkoordinasian urusan, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa / kelurahan berdasarkan peraturan perundangan – undangan yang berlaku.

6. Seksi Pembangunan

Memimpin dan melaksanakan kegiatan pembangunan meliputi penyiapan bahan, penyelenggaraan urusan, penyiapan bahan, pengkoordinasian urusan, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan pembangunan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

7. Seksi Pelayanan, Informasi dan Pengaduan

Memimpin dan melaksanakan kegiatan pelayanan, informasi dan pengaduan meliputi penyiapan bahan penyelenggaraan urusan, penyiapan bahan pengkoordinasian urusan, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan pelayanan, informasi dan pengaduan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Wilayah Administrasi, Data Lembaga dan Pejabat Pemerintahan

N O	DESA/KELURAHAN	LUAS KM ²	PEJABAT	JUMLAH			JUMLAH PENDUDUK		
				RT	RW	DSN/ LING	LK	PR	JML
1	Lamo	113,02	MUHAMMAD IKAF, S.Sos	7	16	3	925	857	1782
2	Balantang	93,84	UMAR SY ABDUL, S.Sos	5	11	3	676	721	1397
3	Bugis	76,40	ARDAN, S.pd	2	6	2	202	232	434
4	Batui	14,76	RINA HpARIANI AS. KADIR, S.Pi	2	6	2	296	300	596
5	Tolando	94,36	ABD. HARIS, SE	7	16	4	1051	1006	2057
6	Sisipan	74,76	H. ASWADI DUU	6	13	3	956	949	1905
7	Bakung	36,00	Drs. MAKMUR	4	10	3	600	639	1239
8	Uso	126,36	SURAIT SALIM	-	12	3	562	528	1090
9	Honbola	123,27	ROJES KUTONDONG	-	12	3	478	445	923
10	Nonong	61,88	SAMUDIN MASAGALA	3	4	3	895	890	1785
11	Kayowa	122,39	Wirda K. LAsanang	3	3	3	411	384	795
12	Ondo Ondolu I	60,00	WISMAN	-	6	3	386	349	735
13	Ondo Ondolu	65,32	Jalaludin	-	4	4	588	530	1118
	Kecamatan Batui	1.062, 36							16.840

C. Penentuan Isu – Isu Strategis

Isu strategis terkait kesehatan masyarakat secara nasional juga diangkat dalam RPJMN tahun 2015 – 2019, antara lain: peningkatan kesehatan ibu, anak, remaja, dan lansia, percepatan perbaikan status gizi masyarakat, pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, perilaku hidup bersih dan sehat. Berkaitan dengan isu strategis nasional tersebut, di Kabupaten Banggai kesehatan ibu menjadi isu yang perlu diperhatikan, terutama dengan adanya Posyandu Pra Konsepsi serta perhatian dalam penurunan angka stunting melalui Rembuk Stunting, walaupun persentase ini masih di bawah angka rerata nasional. Isu strategis yang dihadapi oleh Kecamatan Batui adalah sebagai berikut:

a. Peningkatan Pelayanan kepada masyarakat

Pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah kecamatan sering menjadi tolok ukur dari citra (nama baik) kecamatan sampai pada tataran pemerintah yang lebih tinggi. Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu citra pelayanan yang dapat diberikan oleh kecamatan kepada masyarakat berpengaruh terhadap citra pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Banggai pada umumnya. Perbaikan dan peningkatan kualitas dalam sistem pelayanan di tingkat kecamatan menjadi hal yang harus dilakukan. Peran strategis pelayanan kecamatan dalam mendukung tatakelola pemerintahan yang baik tidak terlepas dari adanya Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dimana ada azas-azas pelayanan public yang harus diperhatikan, antara lain:

- a. Kepentingan umum;
- b. Kepastian hukum;
- c. Kesamaan hak;
- d. Keseimbangan hak dan kewajiban;
- e. Keprofesionalan;
- f. Partisipatif;
- g. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
- h. Keterbukaan;

- i. Akuntabilitas;
- j. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
- k. Ketepatan waktu; dan
- l. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Upaya untuk mewujudkan agar kecamatan menjadi pusat pelayanan masyarakat adalah dikeluarkannya Permendagri Nomor: 4 tahun 2010 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Seluruh Kecamatan di Kabupaten Banggai telah melaksanakan PATEN. PATEN itulah perwujudan tekad Pemerintah Kabupaten Banggai dalam melakukan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Dalam rangka sinkronisasi antara kebutuhan masyarakat dalam pelayanan dengan kemampuan atau kapasitas Kecamatan dalam memberikan fasilitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat maka telah disusun Standar Pelayanan Publik (SPP) di kecamatan yang penyusunannya melibatkan unsur masyarakat.

Dalam rangka mendukung Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan terdapat program peningkatan pelayanan masyarakat berbasis kewilayahan yang terdiri dari tiga kegiatan antara lain kegiatan pelayanan pemerintahan dan Trantib, pelayanan informasi dan pengaduan dan pelayanan perekonomian pembangunan. Ketiga kegiatan itu diampu oleh seksi yang berlainan yang saling bersinergi di dalam pelaksanaan tugasnya, yaitu seksi pelayanan, informasi dan pengaduan, seksi pemerintahan dan Tramtib serta seksi perekonomian dan pembangunan. Kecamatan selaku penyelenggara PATEN telah memiliki persyaratan seperti yang disebutkan dalam Pasal 5 Permendagri nomor 4 tahun 2010 yaitu persyaratan substantif, administrative dan teknis.

Sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat maka kecamatan harus memenuhi beberapa prinsip sebagaimana yang disebut dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 62 Tahun 2003 yaitu disebutkan bahwa penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi beberapa prinsip, salah satunya adalah **kelengkapan sarana dan prasarana, yaitu** tersedianya sarana dan prasarana kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informasi (telematika). Pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan baik oleh kecamatan maupun kelurahan telah dilengkapi dengan gedung-gedung kantor dan juga sarana pendukung kelancaran

pelayanan maupun penunjang kegiatan administrasi perkantoran (perangkat keras dan lunak), sehingga sangat membantu dalam menunjang pelaksanaan kegiatan baik untuk kebutuhan administrasi perkantoran maupun pelayanan kepada masyarakat. Pada Tahun Anggaran 2015 telah dilakukan perbaikan sarana dan prasarana kerja antara lain pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Batui, perbaikan dan pemeliharaan alat-alat kantor, pemeliharaan gedung kantor lurah yang mendukung optimalisasi pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan suasana nyaman dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kondisi lain yang sudah diwujudkan sebelumnya terkait dengan fasilitas pelayanan adalah ruang pelayanan yang nyaman, ber AC untuk Kecamatan Batui, Surat kabar dan minuman / air mineral dan makanan kecil untuk warga yang membutuhkan pelayanan.

Persoalan fasilitas pelayanan yang masih belum optimal adalah gedung kantor Kelura

b. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat

Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan atau kebijakan dalam pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan tolok ukur keberhasilan pemberdayaan masyarakat. Selain itu keterlibatan komponen atau unsur masyarakat dalam perencanaan pembangunan menjadi sebuah tuntutan pengarusutamaan gender dimana kelompok masyarakat rentan harus mendapatkan hak akses dan partisipasi.

Pengambilan kebijakan Perangkat Daerah kecamatan yang diawali atau dimulai dari proses Musyawarah Pembangunan jelas telah melibatkan berbagai unsur dalam masyarakat. Maka kegiatan-kegiatan yang direncanakan merupakan hasil dari masukan masyarakat melalui Musrenbang. Selain itu sasaran dari program kegiatan juga mengacu pada kelompok rentan sesuai yang tertera pada Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia yaitu anak-anak, perempuan, lansia, warga miskin.

c. Pembangunan Kewilayahan

Pembangunan wilayah yang menitikberatkan pada bangunan fisik harus mengacu pada Keputusan Bupati pelimpahan kewenangan. Sehingga kegiatan bersifat fisik dalam pembangunan selain perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang melibatkan warga masyarakat harus memperhatikan kewenangan yang dimiliki oleh kecamatan selain kemampuan pagu anggaran atau pendanaan dari Pemerintah Kabupaten Banggai.

d. Pengarusutamaan gender dalam perencanaan pembangunan

Pengarusutamaan gender menjadi bahan pertimbangan dan menjadi satu terintegrasi mewarnai dalam setiap langkah pembangunan fisik maupun kegiatan yang bersifat non fisik yaitu sosial dan budaya. Dengan kata lain pengarusutamaan gender menjadi bagian dari perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh setiap Pemerintah Daerah. Output dari program yang dilakukan oleh Perangkat Daerah kecamatan tetap sesuai dengan yang dikehendaki oleh kebijakan pengarusutamaan gender, dimana sasaran dan perencanaan melibatkan kelompok prioritas dalam perlindungan yaitu perempuan, warga miskin, lansia, anak-anak dan penyandang disabilitas.

Setiap program yang dilakukan harus mempertimbangkan keadilan gender mulai dari perencanaan. Partisipasi dalam perencanaan tidak boleh membatasi apalagi menghalangi bagi kelompok rentan sebagaimana yang telah disebut pada paragraf sebelumnya, tentu saja sesuai dengan kondisi Kecamatan Batui.

e. Keterbukaan Informasi Publik

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ini memberikan amanat kepada badan publik untuk dapat menyajikan informasi publik sesuai dengan jenisnya terutama terhadap permohonan informasi publik yang berada dalam penguasaannya. Oleh karena itu perlu adanya standar yang jelas dan mudah bagi pemohon informasi publik. Demikian juga dengan pengelolaan internal informasi publik yang menjadi penguasaan badan

publik harus lebih tertib dan tertata dengan baik agar jika sewaktu-waktu dibutuhkan dapat segera disajikan dengan baik.

D. Kondisi Aparatur

Kondisi Aparatur adalah potensi Aparatur Kecamatan yang merupakan ujung tombak Pemerintah yang berhubungan langsung dengan pemerintah desa/kelurahan dan masyarakat, sehingga diperlukan kualitas dan dedikasi yang tinggi bagi para aparat kecamatan. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia maka aparat yang ada perlu diberi kesempatan untuk mengikuti pendidikan lanjutan, baik dalam bentuk pendidikan penjenjangan maupun pendidikan formal / sekolah yang lebih tinggi, disamping itu secara periodik perlu dilakukan pembinaan baik melalui apel pagi, rapat staf dan kegiatan lainnya yang dapat meningkatkan disiplin, motivasi kerja, kinerja dedikasi dan loyalitasnya. Adapaun Data Aparatur Sipil Negara yang ada pada OPD Kecamatan Batui sebagai berikut :

No	Jumlah ASN	Jenis Kelamin	Pendidikan			
			S2	S1	Diploma	SMA
1.	1	L	√			
2.	20	L		√		
3.	13	P		√		
4.	1	P			√	
5.	9	L				√
6.	13	P				√
Total	57					

PEGAWAI KANTOR KECAMATAN BATUI

NO	NAMA	JABATAN	ESELON / GOLONGAN
1	HARIANTO K. GALIB, S.Sos NIP. 19680214 199303 1 015	CAMAT	Eselon III/a
2	MUSLIH B. ADING, S.Pd NIP. 196608141986111001	SEKRETARIS KECAMATAN	Eselon III/b,
3	ZURAIDA B. SALAM, S.Sos NIP. 19630820 198603 2 014	KEPALA SEKSI KECAMATAN	Eselon IV/a
4	Drs. MAKMUR NIP. 19650525 199903 1 005	KEPALA SEKSI KECAMATAN	Eselon IV/a
5	SUARNI SOTANI NIP. 19660605 199412 2 004	KEPALA SEKSI KECAMATAN	Eselon IV/a
6	ARDAN, S.Pd NIP. 19610927 198603 1008	KEPALA SEKSI KECAMATAN	Eselon IV/a
7	Hj. BAHRIA DG. MANGATA, S.Pd NIP. 19760915 200604 2 008	KEPALA SEKSI KECAMATAN	Eselon IV/a
8	MUHAMAD IKAF, S.Sos NIP. 19781023 200012 1 004	LURAH	Eselon IV/a
9	UMAR SYAMSUDIN ABDUL, S.Sos NIP. 19681005 200003 1 008	LURAH	Eselon IV/a
10	BUDIANTO K. ABDUL RAHMAN, S.Sos NIP. 19810514 200801 1 003	LURAH	Eselon IV/a
11	SALAMULHAQ K. ADJAB, SE NIP. 197923 200212 1 007	LURAH	Eselon IV/a
12	ABD. HARIS, SE NIP. 19660627 199403 1 005	LURAH	Eselon IV/a
13	RINA HARIANI A. S. KADIR, S.Pi NIP. 19801216 201001 2 006	LURAH	Eselon IV/a

14	ABDULLAH Hi. A. KARIM, SP NIP. 19731015 200604 1 004	LURAH	Eselon IV/a
15	WIRDA K. LASANANG, S.Kom NIP. 19810519200801 1 003	KEPALA SUB BAGIAN KECAMATAN	Eselon IV/b
16	MARIYANI LAMADA, SH NIP. 19840916 201001 2 005	KEPALA SUB BAGIAN KECAMATAN	Eselon IV/b
17	ROSMAWATI PATAWARI, S.Pt NIP. 19781023 200012 1 004	SEKRETARIS LURAH	Eselon IV/b
18	LISNAWATI NIP. 19641126 198612 2 001	SEKRETARIS LURAH	Eselon IV/b
19	MAHMUDAH, S.Sos NIP. 19820403 201001 2 004	SEKRETARIS LURAH	Eselon IV/b
20	YULISMIATI MALIK, S.Sos NIP. 19660722 199403 2 01	SEKRETARIS LURAH	Eselon IV/b
21	BAHTIAR MUH. NUR DUU, S.Pd NIP. 19681224 199203 1 008	SEKRETARIS LURAH	Eselon IV/b
22	SALAMULHAQ K. ADJAB, SE NIP. 197923 200212 1 007	SEKRETARIS LURAH	Eselon IV/b
23	ABDULLAH Hi. A. KARIM, SP NIP. 19731015 200604 1 004	SEKRETARIS LURAH	Eselon IV/b
24	ARDIANSYAH SUPARDI, SH NIP. 19751001 200701 1 019	KEPALA SEKSI KELURAHAN	Eselon IV/b
25	WIRDA K. LASANANG, S. Kom NIP. 19740605 200212 2 011	KEPALA SEKSI KELURAHAN	Eselon IV/b
26	NURHIDAYAH NIP. 19680308 199003 2 008	KEPALA SEKSI KELURAHAN	Eselon IV/b
27	AISA UMAR, S.IP NIP. 19630117 200701 2 002	KEPALA SEKSI KELURAHAN	Eselon IV/b

28	RINA HARIANI AS KADIR, S.Pi NIP. 19801216 201001 2 006	KEPALA KELURAHAN	SEKSI	Eselon IV/b
29	FATMA LATEKENG, SH NIP. 19680524 200312 2 003	KEPALA KELURAHAN	SEKSI	Eselon IV/b
30	MUNIFAH LAHAMA, S. Ag NIP. 19770721 200902 2 001	KEPALA KELURAHAN	SEKSI	Eselon IV/b
31	FAHRUDIN WADJIB, S.Sos NIP. 19831225 200801 1 005	KEPALA KELURAHAN	SEKSI	Eselon IV/b
32	ABIDIN, S.Pd NIP. 19630727 198903 1 011	KEPALA KELURAHAN	SEKSI	Eselon IV/b
33	ROSNAWATI NAWAWI, S.Sos NIP. 19801027 200801 1 010	KEPALA KELURAHAN	SEKSI	Eselon IV/b
34	ZURAIIDA B. SALAM, S.Sos NIP. 19630820 198603 2 014	KEPALA KELURAHAN	SEKSI	Eselon IV/b
35	MASTIAR DG. PATOMPO, S.Hut NIP. 19760825 200801 2 007	KEPALA KELURAHAN	SEKSI	Eselon IV/b
36	ZULFAN M. PATAPE, S.Pd NIP. 19830723 201001 1 012	KEPALA KELURAHAN	SEKSI	Eselon IV/b
37	ARWIN MARIADJANG, SH NIP. 19791117 200701 1 011	KEPALA KELURAHAN	SEKSI	Eselon IV/b
38	YOELIUS W. HUSAIN, S.Sos NIP. 19750711 199703 1 003	KEPALA KELURAHAN	SEKSI	Eselon IV/b
39	ZAINAL ARIFIN, S.Sos NIP. 19730510200801 1 008	KEPALA KELURAHAN	SEKSI	Eselon IV/b
40	ASRIN ASAMIN NIP. 19610122 198603 1 008	KEPALA KELURAHAN	SEKSI	Eselon IV/b
41	ALFONS BARAMING NIP. 19720321 200604 1 005	BENDAHARA		Jabatan Pelaksana
42	AMIRUDIN KADIM NIP. 19820112 201001 1 010	PENGELOLA SARANA PR SARANA	&	Jabatan Pelaksana

		(BENDAHARA BARANG)	
43	QAMARUDDIN SAMADI NIP. 19600612 200604 1 018	PENGELOLA DATA	Jabatan Pelaksana
44	HASBIA NIP. 19671128 200801 2 008	PENGELOLA DATA	Jabatan Pelaksana
45	ASWIN M. MANGANGKA NIP. 19750312 200701 1 021	PENGELOLA DATA	Jabatan Pelaksana
46	LISNAWATI N. GANI NIP. 19820316 201412 2 001	PENGELOLA DATA	Jabatan Pelaksana
47	RAHMA ALI NIP. 19730118 2000012 2 003	PENGELOLA DATA	Jabatan Pelaksana
48	RENNY SANTOSO NIP. 19850623200604 2 004	PENGELOLA DATA	Jabatan Pelaksana
49	ARIFIN NIP. 19600701 200906 1 001	SEKRETARIS DESA	Jabatan Pelaksana
50	MUHAMMAD NUR NIP. 19680807 200906 1 009	SEKRETARIS DESA	Jabatan Pelaksana
51	ASEP HENDRA, S.Sos NIP. 19670619 200906 1 001	SEKRETARIS DESA	Jabatan Pelaksana
52	SAMUDIN MASAGALA NIP. 19600105 200906 1 001	SEKRETARIS DESA	Jabatan Pelaksana
53	HASMAN M. AGAMA, SH NIP. 19790908 200902 1 004	PENGOLAH	Jabatan Pelaksana
54	NURMIATI PANSAB NIP. 19620109 198101 2 001	PENGADMINISTRASI	Jabatan Pelaksana
55	NURWAHIDA BIDULLAH, S.Sos NIP. 19810504 201001 2 004	PENGADMINISTRASI	Jabatan Pelaksana
56	HASTIN LATAHAN NIP. 19750218 200902 2 001	PENGADMINISTRASI	Jabatan Pelaksana
57	NAICA NIP. 19800507 201411 2 005	PENGADMINISTRASI	Jabatan Pelaksana

data Honorer yang ada pada lingkup Kantor Camat Batui yaitu :

No	Jumlah Honorer	Jenis Kelamin	Pendidikan			
			S2	S1	Diploma	SMA
1.	2	L		√		
2.	8	P		√		
3.	18	P				√
4.	6	L				√
Total	34					

E. Keadaan Sarana dan Prasarana

Dalam mendukung kegiatan tugas sehari – hari Wilayah Kecamatan Turen didukung dengan sarana yang meliputi :

1. Sarana Kerja, sebagai berikut :

No.	Jenis sarana	Jumlah	Kondisi
1.	Kantor Kecamatan	1	Baik
2.	Pendopo Kecamatan	1	Baik
3.	Rumah Dinas Camat	1	Baik
4.	Ruang Rapat	1	Baik
5.	Ruang PKK	1	Baik
6.	Ruang Computer	1	Baik
7.	Gudang	1	Baik
8.	Mobil dinas Camat	1	Baik
9.	Sepeda motor dinas	4	Baik
10.	Meja Kerja	15	Baik
11.	Kursi kerja & kursi tamu	20	Baik
12.	Kursi rapat	6	Baik
13.	Papan data / Informasi	1	Baik

14.	Kamar mandi	2	Baik
15.	Komputer	2	Baik
16.	Printer	4	Baik
17.	Televisi	1	Baik
18.	Mesin Absensi	1	Baik
19.	Filling Cabinet	2	Baik
20.	Rak arsip	1	Baik
21.	Lemari kayu	6	Baik
22.	Lemari besi	2	Baik

F. Keuangan

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Batui pada tahun 2019 berasal dari APBD Kabupaten Banggai. Pada tahun anggaran 2019 kecamatan Batui mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp33.843.270.900,00,- dengan rincian Pencapaian target keuangan Tahun Anggaran 2019 didasarkan pada target Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2019 ditetapkan sebesar Rp.10.091.013.412,- sedangkan realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp.8.298.952.102,- atau 82,24% yang didukung oleh 5 program dan 36 kegiatan.

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp) TAHUN 2019	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN TAHUN 2019 (%)
1.		1.154.492.750	991.309.292	99,27%
1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	3.000.000	100,00%
1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	67.094.900	58.824.342	87,67%
1.3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	71.123.700	71.123.700	100,00%
1.4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	46.668.150	46.661.250	99,99%
1.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	24.000.000	24.000.000	100,00%

1.6	Penyediaan Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	4.266.000	4.266.000	100,00%
1.7	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - Undangan	20.000.000	20.000.000	100,00%
1.8	Penyediaan makanan dan minuman	120.000.000	119.974.000	99,98%
1.9	Rapar-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah	154.700.000	j jn	100,00%
10.	Rapar-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah	224.000.000	224.000.000	100,00%
11.	Penyediaan Jasa Adm Perkantoran	419.640.000	419.460.000	99,96%
2.		97.589.600	97.589.600	100,00%
2.1	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/dinas	6.804.600	6.804.600	100,00%
2.2	Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	-		
2.3	Pengadaan peralatan gedung kantor	21.000.000	21.000.000	100,00%
2.4	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	9.350.000	9.350.000	100,00%
2.5	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	30.350.000	30.350.000	100,00%
2.6	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	18.700.000	18.700.000	100,00%
2.7	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	2.310.000	2.310.000	100,00%
2.8	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	9.075.000	9.075.000	100,00%
4.		10.000.000	3.126.200	31,26%
4.1	Pemulangan Pegawai yang pensiun	10.000.000	3.126.200	31,26%
5.		24.915.000	24.913.850	100,00%
5.1	Pendidikan dan pelatihan formal	9.915.000	9.915.000	100,00%
5.2	Pembinaan dan Pemantauan Kerja Aparatur	15.000.000	14.998.850	99,99%
6.		59.046.400	59.041.950	99,99%
6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	10.000.000	9.998.950	99,98%
6.2	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	13.001.400	12.998.900	99,98%

6.3	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	22.045.000	22.045.000	100,00%
6.4	Penyusunan Laporan Inventarisasi Aset Pemerintah Kabupaten Banggai	14.000.000	13.999.100	99,99%
36.		3.099.282.250	1.749.495.017	56,45%
36.1	Pengembangan Nilai Budaya di tingkat kecamatan	163.960.450	163.914.000	99,97%
36.2	Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam pembangunan	92.500.000	92.494.000	99,99%
36.3	pengembangan wawasan kebangsaan tingkat kecamatan	148.355.800	148.351.650	100,00%
36.4	peningkatan pelayanan kehidupan beragama tingkat kecamatan	103.500.000	103.500.000	100,00%
36.5	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	1.338.788.000	465.747.998	34,79%
36.7	pemberdayaan masyarakat di kelurahan	1.252.178.000	775.487.369	61,93%
TOTAL		4.445.326.000	2.925.475.909	81,16%

G. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Kecamatan Batui yaitu

Bab I PENDAHULUAN

- A. Struktur Organisasi
- B. Tugas Pokok dan Fungsi
- C. Isu Strategis
- D. Keadaan Pegawai
- E. Keadaan Sarana dan Prasarana
- F. Keuangan
- G. Sistematika LKjIP

Bab II PERENCANAAN KINERJA

- A. Perencanaan Strategis
- B. Visi dan Misi Kepala Daerah
- C. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
- D. Strategi dan Arah Kebijakan

- E. Perjanjian Kinerja Tahun 2019
- F. Rencana Anggaran Tahun 2019
- G. Target Belanja Kecamatan Batui
- H. Inovasi

Bab III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis
- C. Akuntabilitas Anggaran

Bab IV PENUTUP

LAMPIRAN - LAMPIRAN

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Sesuai tugas dan kewenangan Kecamatan Batui mempunyai rencana stratejik yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yaitu untuk tahun 2016 – 2021. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul, Rencana Stratejik Kecamatan Batui yang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, serta cara pencapaian tujuan dan sasaran tersebut akan diuraikan dalam bab ini . Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2019 dapat dijelaskan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019.

B. Visi dan Misi

**“Mewujudkan Kabupaten Banggai sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi,
Pertanian dan Kemaritiman Berbasis Kearifan Lokal”**

Pemahaman atas pernyataan visi tersebut mengandung makna terjalannya sinergi yang dinamis antara masyarakat, pemerintah dan seluruh stakeholders dalam merelalisasikan dan semakin memantapkan pembangunan Kabupaten Banggai secara komprehensif.

B. Misi

Untuk mendukung Visi Bupati dan Wakil Bupati Banggai, maka Kecamatan mendukung melalui :

Misi I : **Menciptakan Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Menuju Pemerintahan yang Berwibawa** dengan tujuan Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, Bersih dan Melayani dengan Sasaran Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi Kabupaten Banggai.

C. Tujuan dan Sasaran

Tujuan Kecamatan Batui periode tahun 2016 – 2021 adalah Meningkatkan kualitas Pelayanan public di tingkat Kecamatan”. Penjabaran tujuan dalam sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran dalam 5 tahun mendatang adalah sebagaimana tertuang dalam Tabel 4.1.

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu satu sampai dengan lima tahun ke depan. Sejalan dengan itu, maka Kecamatan Batui memiliki tujuan yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan.

Tujuan tersebut akan diukur melalui indikator kinerja tujuan, yaitu Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Batui dengan formula pengukuran sebagai berikut : **Indeks Kepuasan Masyarakat**

Rumusan Indikator Tujuan

Mengacu pada visi misi yang telah ditetapkan maka indikator tujuan adalah Indeks kepuasan layanan masyarakat. Indeks Kepuasan Masyarakat /Survey Kepuasan Masyarakat, merupakan alat untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diterimawarga masyarakat dari Pemerintah Kecamatan Batui dalam melaksanakan kegiatan secara keseluruhan. Diharapkan dalam waktu 5 tahun meningkat dari 80 menjadi 95,5. Dengan kata lain Indeks yang dilakukan melalui Survey Kepuasan Masyarakat digunakan untuk mengetahui prosentase kepuasan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan yang diberikan oleh pemberi layanan. Semakin tinggi nilai hasil Indeks tersebut, maka masyarakat semakin puas dalam mendapatkan pelayanan yang diberikan oleh kecamatan.

Indikator Kinerja Utama

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan public di tingkat kecamatan batui	Meningkatnya kualitas pelayanan public di tingkat Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	$\frac{\sum \text{total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{penimbang}} \times \text{nilai}$

4.1.2. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh Perangkat Daerah Kecamatan Batui untuk jangka waktu 5 tahun kedepan, Kecamatan Batui menetapkan Sasaran sebagai berikut:

SASARAN									
TUJUAN 1.1 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat Kecamatan									
1.1.1	Meningkatnya Kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan								
1.1.2	Meningkatnya Tata Kelola Kecamatan Batui yang baik, bersih dan akuntabel								
INDIKATOR SASARAN									
No	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	IKU						
1.1.1. Meningkatkan Kualitas pelayanan di tingkat Kecamatan									
1.1.1.1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	YA						
1.1.2. Meningkatkan Tata Kelola Kecamatan Batui yang baik, bersih dan akuntabel									
1.1.1.1	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai	TIDAK						
TARGET INDIKATOR SASARAN PERUBAHAN									
No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TH. 2017	TH. 2018	TH. 2019	TH. 2020	TH. 2021	
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan di tingkat Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	%		80	85	90	95	
2	Meningkatnya Tata Kelola Kecamatan Batui yang baik, bersih dan akuntabel	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai	CC	C	B	BB	A	

D. Strategi dan Arah Kebijakan

Upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Banggai, memerlukan strategi dan arah kebijakan pembangunan untuk dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun.

Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai. Sedangkan arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama lima tahun mulai 2016 sampai dengan 2021. Arah kebijakan memberi pedoman bagi prioritas dan sasaran pokok tahunan di Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD). Penetapan arah kebijakan pembangunan menekankan pada isu pembangunan yang diprioritaskan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan secara bertahap dan berkelanjutan. Program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Program pembangunan daerah menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.

Strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah Kecamatan Batui menunjukkan bagaimana cara Perangkat Daerah Kecamatan Batui mencapai tujuan, sasaran jangka menengah dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Batui.

Untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai harus dipilih strategi yang tepat agar sasaran tersebut dapat tercapai. Strategi Perangkat Daerah Kecamatan Batui mencakup penentuan kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditentukan.

Dengan kata lain bahwa strategi adalah alat penghubung antara visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan pembangunan yang diemban oleh pemerintah daerah dan atau dalam lingkup Perangkat Daerah. Strategi juga merupakan cara/ langkah demi langkah yang dilakukan organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran perencanaan strategisnya.

Tabel
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan (Sesudah Perubahan)

Visi : Mewujudkan Kabupaten Banggai sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi, Pertanian dan Kemaritiman Berbasis Kearifan Lokal			
Misi 1 : Menciptakan Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Menuju Pemerintahan yang Berwibawa			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas pelayanan Public di tingkat kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan Public di tingkat kecamatan Meningkatnya Tata Kelola Kecamatan yang baik, bersih dan akuntabel	Peningkatan Pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Batui Meningkatkan dan Mengoptimalkan sarana dan prasarana Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur	a. Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban b. Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat c. Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat d. Meningkatkan Pembinaan Sosial dan Budaya e. Melaksanakan Inovasi “Subuh Berkah” untuk peningkatan pelayanan dimasyarakat Peningkatan kualitas pelayanan Administrasi Peningkatan kualitas kinerja aparatur Kecamatan

E. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indicator kinerja¹. Pada tahun 2019 Pemerintah Kecamatan Batui berkomitmen menyelesaikan kontrak kinerja sebagaimana tercantum pada dokumen penetapan kinerja di bawah ini :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

KANTOR KECAMATAN BATUI

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SAT	REALISASI S.D. TRIWULAN (Rp)				% CAPAI AN	K E T
					I	II	III	IV		
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di tingkat Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	85	%	29	39	54	87	102,35%	
2	Meningkatnya Tata Kelola Kecamatan Batui yang baik, bersih dan akuntabel	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	Nilai	CC	C	BB	A	100,00%	
		Persentase Peningkatan Disiplin ASN								

PROGRAM

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS
6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Pelaporan
7. Program Pengembangan Sistem Informasi/Data
8. Pembangunan, Kemasyarakatan dan Budaya Tingkat Kecamatan

ANGGARAN

Rp	1.190.878.200
Rp	90.004.600
Rp	-
Rp	26.500.000
Rp	10.000.000
Rp	59.046.400
Rp	0
Rp	3.048.896.800
Rp	4.425.326.000

F. Rencana Kerja Tahunan

Rencana Kerja Tahunan merupakan bentuk dari instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat Daerah. Untuk tahun 2019 Kecamatan Batui telah menetapkan Rencana Kerja Tahun sebagai berikut :

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2019	PROGRAM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	85,0	Program Pembangunan, Kemasyarakatan dan Budaya Tingkat Kecamatan
2	Meningkatnya tata kelola Kecamatan Batui yang baik, Bersih dan Akuntabel	Nilai Akuntabilitas Kinerja	A	1 Program Pelayanan Administrasi perkantoran 2 Program Peningkatan Sarana Prasarana aparatur 3 Program Pengembangan Sistem Informasi/Data 4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 3 Program Fasilitas pindah/purna tugas PNS 4 Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

G. Target Belanja Kecamatan Batui

Anggaran Belanja Kecamatan Batui sebagaimana dalam table sebagai berikut :

Belanja Kantor Kecamatan Batui

No	Uraian	Target	Persentase
1	Belanja Operasi	9.420.581.445,24	90,25
2	Belanja Modal	1.018.110.500,00	9,75
	Jumlah	10.438.691.945,24	100

Tabel Capaian Program dan kegiatan

No.	Program	Target (Outcome)	Capaian Indikator
		Fisik (%)	Fisik (%)
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	100 %
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	100 %
3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100 %	100 %
4	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100 %	100 %
4	Pembangunan, Kemasyarakatan dan Budaya Tingkat Kecamatan	100 %	100 %

H. Inovasi

Untuk mendukung kinerja dalam hal pelayanan di masyarakat, Kecamatan Batui melakukan Inovasi Pelayanan ‘Subuh Berkah’. Dimana kegiatan ini dimulai dari setelah sholat subuh yang dilakukan oleh seluruh ASN di Kecamatan Batui.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas Kinerja menggambarkan tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan dari penjabaran visi, misi dan strategi yang mengidentifikasi tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Sasaran yang telah dipilih dan ditetapkan indikator sasaran serta indikator kinerja. Indikator tersebut merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif tingkat pencapaian suatu tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana tolok ukur kinerja kebijakan Kecamatan Batui berdasarkan Rencana Strategik Kecamatan Batui Tahun 2016 - 2021, dengan memperhitungkan indikator masukan (**Input**), keluaran (**Output**) dan hasil (**Outcome**). Hasil pengukuran pencapaian komponen kinerja ini dituangkan kedalam formulir Pengukuran Kinerja (**PK**). Skala pengukuran kinerja tersebut dibuat berdasarkan sasaran, indikator sasaran dan indikator kinerja yang dimiliki Kecamatan Batui, dengan **Skala Pengukuran Ordinal**, yaitu :

- 85 – 100** : Sangat Baik / Sangat Berhasil
- 70 - < 85** : Baik / Berhasil
- 55 - < 70** : Kurang Baik / Kurang Berhasil
- 3. 55:** Sangat Kurang Baik / Tidak Berhasil.

Pada Tahun 2019 telah dilakukan review Rencana Strategis Kecamatan Batui Tahun 2016-2021 sehingga telah mengalami perubahan mulai tujuan, sasaran, indicator dan target, sehingga telah dilakukan penyesuaian target yang akan dicapai, sesuai dengan table dibawah ini :

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SAT	REALISASI KINERJA	% CAPAIAN
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di tingkat Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	85	%	87	102,35%
2	Meningkatnya Tata Kelola Kecamatan Batui yang baik, bersih dan akuntabel	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	Nilai	A	100,00%

Dari tabel di atas, terdapat tiga sasaran strategis yang terbagi ke dalam dua indikator. Pada tahun 2019, dua indikator telah memenuhi target yang ditetapkan atau sebesar **(tercapai \geq 100%) 102,35%** dari total indikator. Indikator pertama melebihi dari target yang telah ditetapkan, karena didukung oleh Inovasi Pelayanan ‘Subuh Berkah’. Sedangkan untuk Target indikator kedua mengalami kenaikan 100%, karena telah dilakukan review dan pendampingan oleh Tim Sakip Kabupaten, sehingga telah mengalami perbaikan dan perubahan salah satunya adalah adanya Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja di Tahun 2019.

Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Batui

Pelayanan yang dilakukan di Kecamatan Batui telah mengalami peningkatan dengan hadirnya inovasi pelayanan subuh berkah, adapun jenis pelayanan yang dilakukan di Kecamatan terdiri dari :

1. Pelayanan Administrasi Kependudukan

Dalam hal pelayanan ini terdapat 4 jenis pelayanan yaitu Permohonan kartu keluarga, pelayanan permohonan KTP-e, Surat Keterangan Domisili dan Mutasi Pindah/Pergi mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, selain didukung oleh adanya Inovasi pelayanan, sehingga pelayanan ini naik 60 % dari tahun sebelumnya.

2. Pelayanan Perijinan

Terkait pelayanan ini terdiri dari izin keramaian dan keterangan usaha, dalam hal pelayanan pengurusan perijinan juga mengalami kenaikan sekitar 40% dari tahun sebelumnya.

3. Pelayanan Surat Keterangan dan Legalitas Umum/Pelayanan Umum

Pada pelayanan ini lebih banyak pada kegiatan diluar jam kerja, sehingga masyarakat lebih banyak berinteraksi dengan pejabat structural, sehingga permasalahan yang dihadapi dimasyarakat tidak harus menunggu jam kantor, tetapi bisa dapat diselesaikan setelah subuh hari, pelayanan yang mengalami peningkatan lebih dari 105,35 % adalah Pelayanan Legislasi Umum dan Pelayanan Umum, sedangkan Legalitas Keterangan Waris naik 33 %, Surat Keterangan Tanah Naik 100 %, Surat Keterangan Tanah dan Keterangan Kesepakatan Bersama mengalami kenaikan 103 %.

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2018

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kecamatan Batui dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Kecamatan Batui dengan realisasinya. Pada Tahun sebelumnya indicator sasaran tidak dituangkan dalam perjanjian kinerja, Pencapaian Kinerja Tahun 2019.

Sesuai dengan hasil Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Kecamatan Batui adalah tercapai rata-rata sebesar **100 %**, yang didukung oleh semua elemen masyarakat dengan melaksanakan Program dan kegiatan yang ditujukan dan diharapkan bermanfaat bagi segala lapisan masyarakat.

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja sebelumnya,

Tabel : Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019

No	Indikator Sasaran	Baseline 2018	2019			Target Akhir Renstra (2021)	Capaian s/d 2019 terhadap target 2021 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi*		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai Akuntabilitas Kinerja	70 C	85 B	87 A	102,35 100%	95 A	20,53

Capaian realisasi indikator IKM yang ditempatkan pada tahun 2019 ini masuk kategori sangat baik yaitu sebesar 102,35%.

D. Analisis Kinerja

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa target kinerja Kecamatan Batui sudah melebihi target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, adapun rincian kegiatan dalam indicator kinerja tersebut sebagai berikut :

Analisa Penyebab Keberhasilan atas kegagalan

Pengendalian Banjir berhasil karena pihak Pemerintah sering mengadakan sosialisasi terhadap warga masyarakat untuk mengadakan kerja bhakti bersama untuk membersihkan selokan dan drainase

Perencanaan pembangunan berhasil karena pihak pemerintah mensosialisasikan dengan memfasilitasi pelaksanaan Musrenbang baik di Desa maupun di Kecamatan..

Harmonisasi Antar Umat Beragama, Keberhasilan Program tersebut didukung oleh semua RT, RW se Kecamatan Batui karena masyarakat sadar akan pentingnya toleransi antar umat beragama

Peningkatan Peningkatan Peran serta kepemudaan dalam peningkatan tersebut berhasil kerena pihak pemerintah mengadakan sosialisasi dengan pemuda yang ada di Kecamatan Batui dan masih butuh peningkatan peran serta Pemerintah dengan pemuda yang ada di wilayah Kecamatan Batui, yang kegiatan tersebut dilakukan melalui kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan.

Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan sangat berhasil karena adanya koordinas dan sosialisasi antara pihak Kecamatan dengan Desa serta Aparat se Kecamatan Batui.

Peningkatan Nilai Budaya sangat berhasil karena adanya koordinas dan sosialisasi antara pihak Kecamatan dengan Desa serta Tokoh adat se Kecamatan Batui.

Peningkatan Wawasan Kebangsaan sangat berhasil karena adanya koordinasi dan sosialisasi antara pihak Kecamatan dengan Desa serta Aparat se Kecamatan Batui.

Pelayanan Administrasi Perkantoran mempunyai 11 (sebelas) kegiatan dengan berhasilnya kegiatan tersebut, maka Kecamatan memilih untuk pelayanan yang terbaik bagi masyarakat sehingga mendapat kenyamanan dalam melayani masyarakat.

Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur mempunyai 9(Sembilan) Kegiatan keberhasilan program tersebut maka Kantor Kecamatan Batui memenuhi kebutuhannya, sehingga ASN nyaman dalam melakukan kegiatan.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan mempunyai 5 (Lima) Kegiatan dalam program tersebut sangat berhasil sehingga cepatnya pelaporan kinerja dalam Kantor Kecamatan Batui menjadi lancar.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Keberhasilan dalam program tersebut maka Personil Kecamatan Batui bisa bekerja secara maksimal.

E. Analisis atas Efisiensi Pengguna Sumber Daya

Sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, efisiensi adalah hubungan antara masukan dan keluaran, efisiensi merupakan ukuran apakah penggunaan barang dan jasa yang dibeli dan digunakan oleh organisasi perangkat pemerintahan untuk mencapai tujuan organisasi perangkat pemerintahan dapat mencapai manfaat tertentu. Efisiensi juga mengandung beberapa pengertian antara lain :

- Efisiensi pada sektor hasil dijelaskan dengan konsep masukan-keluaran (input/output)
- Efisiensi pada sektor pelayanan masyarakat adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan pengorbanan seminimal mungkin; atau dengan kata lain suatu kegiatan telah dikerjakan secara efisien jika pelaksanaan pekerjaan tersebut telah mencapai sasaran dengan biaya yang ditentukan dalam APBD.

- Efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dicapai dengan memperhatikan aspek hubungan dan tatakerja antar instansi pemerintah daerah dengan memanfaatkan potensi dan keanekaragaman suatu daerah.

Maka sesuai dengan efisiensi sebagaimana indicator sasaran yang dicapai 102,35 %, maka dapat dilakukan efisiensi anggaran sebesar 23,11%.

Faktor penentu efisiensi adalah :

- ✓ Faktor teknologi pelaksanaan pekerjaan.
- ✓ Faktor struktur organisasi yaitu susunan yang stabil dari jabatan-jabatan baik itu struktural maupun fungsional.
- ✓ Faktor sumber daya manusia seperti tenaga kerja, kemampuan kerja, maupun sumber daya fisik seperti peralatan kerja, tempat bekerja serta dana keuangan.
- ✓ Faktor dukungan kepada aparatur dan pelaksanaannya baik pimpinan maupun masyarakat.
- ✓ Faktor pimpinan dalam arti kemampuan untuk mengkombinasikan keempat faktor tersebut kedalam suatu usaha yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mencapai sasaran yang dimaksud

F. Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Dari satu indikator kinerja dapat diuraikan hal-hal yang menjadi faktor keberhasilan, kegagalan/hambatan dan kendala serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil dalam pelaksanaan program dan kegiatan tersebut diantaranya yaitu :

a) Faktor Keberhasilan

- Adanya Dukungan Masyarakat untuk melaksanakan kerja bakti

- Perencanaan Kerja yang terprogram
- Koordinasi yang baik antara Kecamatan, Kelurahan, Desa, Aparat Keamanan (Polsek dan Danramil), Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat dan Tokoh Pemuda diwilayah Kecamatan Batui
- Meningkatnya Pelayanan Masyarakat dengan tertib dan professional dengan adanya Inovasi Pelayanan “Subuh Berkah”
- Tersedianya Sarana dan Prasarana Kerja yang memadai
- Tersedianya kemampuan SDM
- Adanya dukungan positif dan persetujuan kegiatan dari Pimpinan.

b) Faktor Kegagalan

Tidak terdapat faktor yang menyebabkan kegagalan dalam program ini.

c) Langkah-Langkah Antisipatif

- Koordinasi yang lebih terencana dan terorganisir antara Kecamatan dengan penyelenggara diklat dan pihak-pihak terkait lainnya;
- Kesiapan Alokasi APBD
- Kesiapan Personil ASN yang mengikuti Diklat

Pendidikan dan pelatihan formal aparatur yaitu :

1. Pendidikan pelatihan Penatausahaan dan Akuntansi Keuangan Daerah.
2. Pendidikan dan pelatihan Manajemen Barang Milik Daerah
3. Pendidikan dan pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa
4. Pendidikan dan pelatihan Penyusunan Dokumen Kepegawaian

D. Inovasi

Dalam rangka meningkatkan pelayanan yang prima, maka dari kecamatan Batui melakukan inovasi pelayanan, guna memberkan pelayanan kepada masyarakat. Inovasi ini sangat bermanfaat kepada masyarakat yang tidak dapat melakukan pelayanan pada jam

kerja, sehingga pelayanan mengalami peningkatan sebagaimana dalam table sebagai berikut :

Tabel Capaian Pelayanan dengan Inovasi “Subuh Berkah”

No	Nama Pelayanan	Sebelum ada Inovasi Per hari	Sesudah ada Inovasi Per hari
1.	Pelayanan Adm. Kependudukan		
	- Permohonan Kartu Keluarga	10	16
	- Pelayanan KTP	35	50
	- Surat Keterangan Domisili	12	22
2.	Pelayanan Perijinan		
	- Surat Keterangan Usaha	3	5
3.	Pelayanan Surat Keterangan/Legalitas Umum/Pelayanan Umum		
	- Legalitas Keterangan Waris	1	3
	- Surat Keterangan Tanah	1	2
	- Keterangan Kuasa	2	5
	- Keterangan kesempatan bersama	3	4
	- Pelayanan Legislasi Umum	4	8
	- Pelayanan Umum	2	4

D. Akuntabilitas Anggaran

Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Banggai yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode Tahun Anggaran 2018 yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Kabupaten Banggai. Sebagai penerapan dari kebijakan belanja daerah pada Tahun 2019 realisasi Belanja Kantor Kecamatan Batui sebesar Rp8.298.952.102,00 atau (82,24%) dari Pagu Anggaran senilai Rp10.091.013.412 yang terdiri dari:

Tabel
Belanja Kantor Kecamatan Batui

NO	URAIAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	%	REALISASI 2018
1	Belanja Operasi	9.420.581.445,24	8.613.473.338,00	91,43	8.178.960.736,00
2	Belanja Modal	1.018.110.500,00	941.875.200,00	92,51	226.232.500,00
	J U M L A H	10.438.691.945,24	9.555.348.538,00	91,54	8.405.193.236,00

1) Belanja Operasi

Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Kantor Kecamatan Batui yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa.

Realisasi Belanja Operasi mencapai sebesar Rp5.632.236.193,00 dari Pagu Anggaran Rp8.925.670.812,00 Belanja Operasi menyerap dana sebesar 88,25% dari anggaran Belanja Operasi. Belanja Operasi terdiri dari :

a) Belanja Pegawai

Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Penghasilan lainnya diberikan untuk peningkatan kesejahteraan dengan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp5.218.776.193,00 dari Pagu Anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp5.645.687.412,00 atau 92,67%, realisasi ini terutama di gunakan untuk:

Tabel
Belanja Pegawai Kantor Kecamatan Batui

NO	URAIAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	%	REALISASI 2018
1	Belanja Gaji Pokok PNS	2.187.247.455,00	2.003.546.494,00	91,60	1.925.902.684,00
2	Belanja Tunjangan Keluarga	204.624.579,00	200.444.126,00	97,96	204.935.846,00
3	Belanja Tunjangan Jabatan	208.816.750,00	206.710.000,00	98,99	199.669.750,00
4	Belanja Tunjangan Fungsional Umum	51.386.750,00	50.100.000,00	97,50	56.035.000,00
5	Belanja Tunjangan Beras	108.724.146,00	106.095.300,00	97,58	113.482.140,00
6	Belanja Tunjangan Pph/Tunjangan Khusus	2.547.589,00	2.234.602,00	87,71	1.830.317,00
7	Belanja Pembulatan Gaji	36.166,00	35.355,00	97,76	32.807,00
8	Belanja Jaminan Kesehatan	57.723.794,00	56.567.021,00	98,00	54.664.661,00
9	Belanja Tambahan Penghasilan	2.187.194.863,00	1.656.778.801,00	75,75	1.617.075.330,00
10	Belanja Uang Lembur	83.436.000,00	79.560.000,00	95,35	
	J U M L A H	5.091.738.092,00	4.362.071.699,00	85,67	

Untuk belanja Tambahan Penghasilan TA 2019 dianggarkan Rp2.187.194.863,00 dan realisasi sebesar Rp1.656.778.801,00. Adapun anggaran yang tidak mencapai target dikarenakan belanja dilakukan sesuai dengan Prestasi Kehadiran dan Prestasi Kinerja masing-masing ASN Kantor Kecamatan Batui

b) Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

Belanja Barang dan Jasa dianggarkan sebesar Rp2.866.343.400 dan terealisasi sebesar Rp2.244.913.311 atau 92,21%. Berikut ini adalah rincian dari Belanja Barang dan Jasa adalah sebagai berikut:

Tabel
Belanja Barang dan Jasa

NO	URAIAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	%	REALISASI 2018
1	Belanja Bahan Pakai Habis	363.800.292,00	360.770.792,00	99,17	860.624.156,00
2	Belanja Bahan/Material	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00	2.200.000,00
3	Belanja Jasa Kantor	242.619.700,00	226.425.828,00	93,33	292.360.595,00
4	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	51.300.000,00	39.674.100,00	77,34	32.172.500,00
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	873.415.700,00	851.417.411,00	97,48	716.552.400,00
6	Belanja makanan dan Minuman	111.930.000,00	108.315.000,00	96,77	165.074.000,00
7	Belanja Perjalanan Dinas	1.260.406.661,24	1.259.240.008,00	99,91	1.369.905.150,00
8	Belanja Pemeliharaan	618.900.000,00	617.706.000,00	99,81	20.418.000,00
9	Belanja Jasa Konsultansi	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	195.000.000,00
10	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	18.671.000,00	9.000.000,00	48,20	-
11	Belanja Honorarium Non PNS	712.800.000,00	703.852.500,00	98,74	196.000.000,00
	J U M L A H	4.328.843.353,24	4.251.401.639,00	98,21	

Pada Tahun Anggaran 2019, Kantor Kecamatan Batui telah menganggarkan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp4,445,326,000,00 dan terealisasi sebesar Rp3.080.175.909,00. Realisasi sebesar Rp3.080.175.909,00 tidak mencapai target sesuai yang dianggarkan karena ada beberapa belanja yang merupakan sisa dari belanja yang tidak cukup hitungan satuannya.

2) Belanja Modal

Belanja Modal digunakan untuk pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan seperti perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

Realisasi Belanja Modal mencapai sebesar Rp421.802,598,00 dari Pagu Anggaran sebesar Rp1.165.342.600,00 Belanja Modal menyerap dana sebesar 36,20% dari anggaran Belanja Modal yang telah ditetapkan setelah perubahan. Berikut ini adalah rincian Belanja Modal adalah sebagai berikut:

, adapun belanja modal yang menyerap dana terbesar adalah pada belanja modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp321,804,600,00 dan pada Belanja Modal Jalan, irigasi dan Jaringan ada sisa dana yang tidak realisasi sejumlah Rp743.538.000 karena tidak tersediannya anggaran dari sumber dana DAU Tambahan.

3) Surplus/(Defisit)

Pada TA 2019, Perbandingan penganggaran antara pendapatan dan belanja daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Banggai deficit/surplus sebesar Rp.10,438,691,945,24,- dan terealisasi surplus/defisit sebesar Rp.9,555,348,538,-

Tabel
Realisasi Anggaran Tahun 2019

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp) TAHUN 2019	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN TAHUN 2019 (%)
1.		1.154.492.750	991.309.292	99,27%
1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	3.000.000	100,00%
1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	67.094.900	58.824.342	87,67%
1.3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	71.123.700	71.123.700	100,00%
1.4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	46.668.150	46.661.250	99,99%
1.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	24.000.000	24.000.000	100,00%
1.6	Penyediaan Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	4.266.000	4.266.000	100,00%
1.7	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - Undangan	20.000.000	20.000.000	100,00%
1.8	Penyediaan makanan dan minuman	120.000.000	119.974.000	99,98%
1.9	Rapar-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah	154.700.000	j jn	100,00%
10.	Rapar-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah	224.000.000	224.000.000	100,00%
11.	Penyediaan Jasa Adm Perkantoran	419.640.000	419.460.000	99,96%
2.1	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/dinas	6.804.600	6.804.600	100,00%
2.2	Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	-		
2.3	Pengadaan peralatan gedung			100,00%

	kantor	21.000.000	21.000.000	
2.4	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	9.350.000	9.350.000	100,00%
2.5	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	30.350.000	30.350.000	100,00%
2.6	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	18.700.000	18.700.000	100,00%
2.7	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	2.310.000	2.310.000	100,00%
2.8	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	9.075.000	9.075.000	100,00%
4.1	Pemulangan Pegawai yang pensiun	10.000.000	3.126.200	31,26%
5.1	Pendidikan dan pelatihan formal	9.915.000	9.915.000	100,00%
5.2	Pembinaan dan Pemantauan Kerja Aparatur	15.000.000	14.998.850	99,99%
6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	10.000.000	9.998.950	99,98%
6.2	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	13.001.400	12.998.900	99,98%
6.3	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	22.045.000	22.045.000	100,00%
6.4	Penyusunan Laporan Inventarisasi Aset Pemerintah Kabupaten Banggai	14.000.000	13.999.100	99,99%
36.		3.099.282.250	1.749.495.017	56,45%
36.1	Pengembangan Nilai Budaya di tingkat kecamatan	163.960.450	163.914.000	99,97%
36.2	Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam pembangunan	92.500.000	92.494.000	99,99%
36.	pengembangan wawasan			100,00%

3	kebangsaan tingkat kecamatan	148.355.800	148.351.650	
36. 4	peningkatan pelayanan kehidupan beragama tingkat kecamatan	103.500.000	103.500.000	100,00%
36. 5	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	1.338.788.000	465.747.998	34,79%
36. 7	pemberdayaan masyarakat di kelurahan	1.252.178.000	775.487.369	61,93%
TOTAL		<u>4.445.326.000</u>	<u>2.925.475.909</u>	81,16%

BAB IV KESIMPULAN

LKjIP adalah media pertanggungjawaban yang berisi mengenai kinerja instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi. LKjIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya *Good Governance*. Dalam perspektif yang lebih luas LKjIP juga berfungsi sebagai media pertanggungjawaban pada publik.

LKjIP Kecamatan Batui ini menggambarkan penekanan pada manajemen pelaksanaan pemerintahan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, dimana organisasi pemerintah Kecamatan Batui melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja instansi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. LKjIP menjadi bagian dari upaya pertanggung-jawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, LKjIP akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. LKjIP bagi Pemerintah Kecamatan juga menjadi punya makna strategis, sebagai bagian dari penerjemahan tugas dan fungsi Kecamatan. Dalam kaitannya dengan kedudukan Kecamatan, LKjIP juga menjadi bagian dari pertanggung-jawaban tugas dan fungsi Pemerintah.

Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun pelaporan (2019), namun juga kontribusinya untuk pencapaian target akhir Renstra OPD (tahun 2021). Secara umum, nampak bahwa kinerja Pemerintah Kecamatan Batui pada tahun 2019 dapat di kategorikan sangat berhasil dengan capaian secara umum 105,11 % dan dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Batui melalui berbagai rintangan dan hambatan, serta berbagai prioritas program untuk mendukung

pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. Upaya ini telah mencakup perumusan dan penetapan kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan (Renja), khususnya dalam Renstra tahun 2016-2021, yang mencakup juga penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya. Selain itu juga mencakup bukan hanya sekedar pelaksanaan program/kegiatan yang rutin dilakukan, namun juga pengembangan inovasi.

Transparansi serta akuntabilitas public sebagai satu paket kebijakan. Namun demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja Pemerintah Kecamatan Batui kedepan ke depan. Walaupun IKU yang ada telah mencapai target yang sangat baik, persoalan-persoalan di masyarakat masih perlu dikoordinasikan lebih lanjut dengan Instansi terkait. Hal ini akan menjadikan LKjIP benar benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang semakin baik.

Dalam pelaksanaannya telah mencapai keberhasilan namun juga ditemui adanya ketidakberhasilan karena beberapa hambatan yang dihadapi. Adapun keberhasilan yang telah dicapai antara lain disebabkan oleh :

1. Deskripsi kewenangan, tugas pokok dan fungsi yang jelas
2. Adanya beberapa SDM yang handal
3. Adanya semangat kerja yang baik
4. Lingkungan kerja yang kondusif
5. Adanya kemitraan antara Pemerintah, masyarakat dan stakeholder
6. Adanya potensi dan Sumber Daya Sosial dan Ekonomi di Wilayah
7. Adanya komitmen Camat untuk mengembangkan Kecamatan

Sedangkan Ketidakberhasilan yang ada, dikarenakan :

1. Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya pegawai yang belum sesuai dengan beban tugas
2. Peraturan pelaksanaan teknis yang belum jelas dan kurang koordinatif
3. Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi
4. Semakin tingginya tuntutan pelayanan Masyarakat

5. Masih rendahnya Kesadaran Masyarakat untuk mengikuti Prosedur pelayanan.
6. Banyaknya tambahan pelimpahan kewenangan dari Bupati Kab. Banggai kepada camat namun tidak dimbangi dengan tambahan SDM.

Beberapa **“strategi”** untuk mengatasi permasalahan yang ada, antara lain :

1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Pelatihan Exelent service), Bintek, Pelatihan Kepemimpinan, public speaking bagi seluruh Pegawai Kecamatan Batui. Pelatihan tersebut dilaksanakan dengan Anggaran pelimpahan Kewenangan kepada Camat.
2. Adanya upaya untuk memotivasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama dalam memenuhi prosedur pelayanan
3. Mengoptimalkan Dukungan Sumber daya pegawai yang ada dan memberikan kesempatan kepada pegawai yang masih potensial untuk dikembangkan.
4. Memanfaatkan personil yang ada, termasuk adanya ketugasan rangkap dalam administrasi keuangan.
5. Selalu konsultasi dengan BPKAD
6. Mengusulkan kepada pemerintah atasan dan OPD Pembina untuk membuat aturan-aturam yang implementatif yang mudah dipahami dan tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda.
7. Terus mengupayakan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya penggunaan teknologi informasi.
8. Berupaya untuk memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam mendukung ketugasan.
9. Selalu bekerjasama dan bermitra dengan lembaga-lembaga masyarakat yang ada, , PKK dan lain-lain. Adanya koordinasi, sinergitas maupun kerjasama yang baik, antar pegawai, antar instansi maupun lembaga yang ada dapat menghasilkan kerja sama yang baik. Selanjutnya dengan kerja sama yang baik dapat menutupi faktor hambatan yang menonjol yaitu Sumber Daya Manusia. Dengan memaksimalkan koordinasi dan kerja sama yang baik, maka kekurangan dapat tercukupi.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Batui Tahun 2019 yang disajikan dengan segala keterbatasan. Tentu saja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diberikan kepada Kecamatan Batui terdapat keberhasilan dan kekurangan yang ada, untuk itu kekurangan ini perlu didukung dengan potensi organisasi yang ada, termasuk komponen Seluruh Organisasi Kemasyarakatan yang ada di Kecamatan Batui semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi peningkatan kinerja di masa yang akan datang.



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
KECAMATAN BATUI

Alamat : Jln.Unjok No. 1 Kecamatan Batui Kode Pos (94762)

Batui, 28 Mei 2018

Nomor : 0122/kec.Bti/V/2018
Perihal : Pelaksanaan Inovasi Pelayanan
"Subuh Berkah"
Lampiran : -

Kepada Yth.
Para Lurah se Kec. Batui

SURAT EDARAN

Dalam rangka pelaksanaan Inovasi "Pelayanan Subuh Berkah" yang telah digagas oleh Kecamatan Batui, maka dengan ini diharapkan untuk dapat berpartisipasi dan ikut aktif dalam kegiatan pelayanan subuh berkah di Kelurahan masing – masing, untuk kecamatan terpusat di Mesjid Jami' Kelurahan Balantang, Kegiatan mulai aktif sejak tanggal 30 Mei 2018, serta diharapkan untuk menginformasikan kepada seluruh masyarakat di Kecamatan Batui. Kegiatan Inovasi ini akan di evaluasi setiap 3 bulan berjalan di Kantor Camat Batui.

Demikian penyampaian dari kami, atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terimakasih .

